



Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

Suroto¹ Kandung Sapto Nugroho² Haekal Saniarjuna³ Agus Lukman Hakim⁴

¹Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Pandeglang Banten, and
sutoto@stiabanten.ac.id

²Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten
kandung.sapto@untirta.ac.id

³PT Abyakta Sinergi Nusantara, Jakarta
haekalsaniarjuna@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Pandeglang Banten, and
aguslukman.hakim@stiabanten.ac.id

Received : Dec 20, 2024; Accepted : Apr 22, 2025

DOI 10.25299/jiap.2025.20451

Abstract

This study aims to evaluate the quality of development planning in Pandeglang Regency by measuring the National Development Planning Index (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional or IPPN). A qualitative approach was employed using content analysis, assessing planning documents through scoring based on three dimensions: synergy, planning quality, and the alignment between development planning and performance planning. Data were collected from RPJMD, RKPD, and key performance indicators of the region. The results indicate that Pandeglang Regency's IPPN for 2024 achieved a score of 94.81, categorized as very good. The synergy dimension scored 26.81 out of 32, highlighting some deficiencies in aligning the goals and priorities between the RPJMD and RPJMN documents. The planning quality dimension achieved the maximum score of 58, reflecting the alignment of strategic issues with planned programs/activities and innovation in development planning. The dimension of the alignment between planning and performance scored a perfect 10 out of 10, indicating consistency between development targets and institutional performance targets. This study emphasizes the importance of aligning regional and national planning to prevent implementation conflicts. The IPPN serves as a strategic tool for local governments to enhance planning effectiveness, prioritize development projects, and allocate resources efficiently to achieve sustainable and equitable development. These findings are expected to provide recommendations for improving the quality of development planning in Pandeglang Regency.

Key Words : IPPN, Pandeglang, Sustainable Development, Synergy, Planning Quality.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang melalui pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode analisis isi, yang melibatkan penilaian dokumen perencanaan menggunakan skoring berbasis tiga dimensi: sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Data dikumpulkan dari dokumen RPJMD, RKPD, dan indikator kinerja utama daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPPN Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 memperoleh skor 94,81, termasuk dalam kategori sangat baik. Dimensi sinergi menunjukkan skor 26,81 dari 32, dengan catatan masih ada kekurangan dalam keselarasan sasaran dan prioritas antara dokumen RPJMD dan RPJMN. Dimensi kualitas perencanaan mencatat nilai maksimal 58, mencerminkan kesesuaian isu strategis dengan program/kegiatan yang dirancang serta inovasi dalam perencanaan pembangunan. Dimensi keterhubungan perencanaan dengan kinerja memperoleh nilai sempurna, yaitu 10 dari 10, mencerminkan keselarasan antara target pembangunan dan target kinerja instansi terkait. Penelitian ini menyoroti pentingnya keselarasan antara perencanaan daerah dan nasional untuk menghindari konflik implementasi. IPPN dapat menjadi alat strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, menentukan prioritas pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Key Words : IPPN, Pandeglang, Pembangunan Berkelanjutan, Sinergi, Kualitas Perencanaan.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keragaman yang tinggi. Sinergi antara pusat dan daerah dapat menciptakan fleksibilitas kebijakan dalam bingkai NKRI dengan tetap menjaga semangat otonomi daerah yang berkeadilan (Haris, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Proses Perencanaan pembangunan dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Arah perencanaan pemerintah pusat diantaranya dituangkan dalam RPJPN dan RPJMN, sedangkan perencanaan pemerintah daerah dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD. Keberadaan arah perencanaan pemda dengan pemerintah pusat diharapkan bisa sinergi dan saling memperkuat sehingga selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan memiliki tujuan sebagai berikut: mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan

sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan tujuan tersebut, dibutuhkan keselarasan perencanaan pemerintah daerah dengan perencanaan pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan dapat dilihat arah pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Pada banyak daerah, kualitas perencanaan terus diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak ke masyarakat. Benjamin Franklin mengatakan bahwa *'if you fail to plan, you plan to fail'*. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa proses pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaannya. Teuku Nazaruddin dalam Marto Silalahi et al (2021:12), menegaskan bahwa keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-citakan, apabila terdapat perencanaan pembangunan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan koordinasi perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik membutuhkan perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tujuan bernegara adalah ingin memajukan kesejahteraan umum yang direalisasikan melalui proses pembangunan. Berdasarkan hal tersebut pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keberhasilan pembangunan nasional memerlukan suatu rencana pembangunan daerah yang berkualitas dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan daerah berarti keberhasilan pembangunan dalam lingkup nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun dan dievaluasi untuk mengukur kualitas dan tingkat keberhasilan strategi yang telah ditetapkan dengan berbagai macam indikator yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan komponen penilaian yaitu integrasi, sinkronisasi dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah daerah menggunakan komponen penilaian yaitu sinergi, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dengan salah satu misinya adalah menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk itu, perlu dibuat indeks sebagai matriks penilaian

terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien. Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat nasional maka disusun Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang penyusunannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka memperkuat dan mempertajam keselarasan serta kesesuaian rencana pembangunan nasional, maka Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menginisiasi pengembangan pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). IPPN tersebut digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K / L / DI). Komponen utama dari penilaian IPPN ini dengan melihat keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sehingga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kementerian/ Lembaga (K/L) perlu menyusun rencana yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menghindari terjadinya ego sektoral perencanaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembangunan yang kontradiktif. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diarahkan juga pembangunan daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Walaupun perencanaan pembangunan daerah berjalan masing-masing namun arah tujuannya masih saling mendukung satu

sama lain secara nasional. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sendiri merupakan mandat dari PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) mengevaluasi keselarasan antara perencanaan yang disusun oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk memastikan keterpaduan dalam pembangunan nasional. Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu merancang rencana yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menghindari terjadinya pemisahan perencanaan sektoral yang bisa mengakibatkan konflik dalam pelaksanaan pembangunan. Pada sisi lain, ditemukan permasalahan pada beberapa daerah tentang belum optimalnya sinkronisasi perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal tersebut bisa disebabkan karena pimpinan daerah dan pimpinan berbeda partai politik atau gesekan aktor politik yang berdampak pada perhatian pemerintah pusat pada daerah tertentu masih kurang optimal. Faktor lain juga bisa disebabkan karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat (Soares, 2015).

Kasus kepemimpinan di Pandeglang dipimpin oleh pemimpin yang berbeda partai dengan tingkat provinsi dan juga berbeda dengan tingkat nasional. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah bisa sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah juga perlu menyusun Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPN)

sebagai upaya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih terstruktur dan terukur, dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkualitas.

Sehingga tujuan dari kajian ini adalah memberikan dasar dalam mengambil keputusan strategis dalam hal alokasi sumber daya, penentuan prioritas pembangunan, dan evaluasi kinerja pembangunan. Dengan adanya IPPN, diharapkan mampu merespon penilaian keberhasilan rencana pembangunan pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang. Hasilnya dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang relevan dalam mencapai tujuan *Good Governance*, khususnya untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Pandeglang secara berkelanjutan. Selain itu, penyusunan IPPN pemerintah daerah diharapkan bisa melihat arah pembangunan daerah, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. IPPN dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga lokal. Dengan hal ini, IPPN akan membantu merumuskan formula yang lebih representatif, terukur, akuntabel, inklusif dan akurat untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Tinjauan Pustaka

Secara umum, perencanaan pembangunan merupakan proses pengembangan kualitas masyarakat dalam

jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat (Irwan, I., Latif, A., Mustanir, A., & Sellang, 2021). Lebih lanjut, menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan, yang dilakukan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat hingga pada tingkat daerah. Proses perencanaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik dari pelaksanaan kebijakan. Proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi tersebut adalah wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan yang terhitung dalam skala lokal daerah.

Pendekatan perencanaan pembangunan harus juga mengandung unsur-unsur substantif yang kemudian berorientasi kepada aspek holistik-tematik, spasial dan integratif (Perera, 2016). Aspek holistik-tematik menekankan pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan di dalam faktor potensi, hambatan, tantangan dan/atau permasalahan yang saling terkait satu dengan lainnya. Sementara, aspek integrasi menekankan pada penyatuan kewenangan di dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas di dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Terakhir, aspek spasial menekankan pada dimensi pemanfaatan ruang di dalam perencanaan. Aspek spasial mempertimbangkan keseimbangan antara potensi ruang yang ada dengan sumber daya yang dimiliki suatu daerah.

(Nitisastro, 2014) memperincikan hal yang tercakup dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Proses pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaannya. Kegagalan merencanakan pembangunan sama halnya dengan merencanakan kegagalan (Rahayu, 2017). Oleh karena itu, kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Pada banyak daerah, kualitas perencanaan terus diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak ke masyarakat. Tuntutan akan adanya pembangunan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sering terjadi dengan adanya kebijakan otonomi daerah di tahun 2000 (Turner & Sarah, 2002); (Safitri, 2016).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni dengan melakukan skoring penilaian atas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dengan tipe content analysis method. Eriyanto, (2011) berpendapat bahwa metode analisis isi adalah metode kuantitatif, karena analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu yang dilakukan secara kuantitatif. Pengolahan data Analisis isi dilakukan secara kuantitatif dan dilaksanakan secara objektif, mengutamakan ketepatan dalam mengidentifikasi isi pernyataan dan

melakukan penghitungan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa analisis isi adalah metode kuantitatif adalah (Neuendorf, 2002) *“content analysis may be briefly defined as the systematic, objective, quantitative analysis of message characteristics”*. Analisis isi didefinisikan sebagai analisis karakter pesan yang dilakukan secara sistematis, objektif dan kuantitatif.

Kerangka pemikiran dalam kajian Indeks Kualitas Perencanaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mengacu kepada pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas, dimana dapat diukur dengan 3 aspek yaitu Sinergi, Kualitas Perencanaan, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara top-down oleh pusat perlu dikombinasikan dengan pendekatan bottom-up dari daerah. Kolaborasi ini dapat memperkaya substansi perencanaan nasional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi lokal yang lebih spesifik (Wahyudi, 2018). Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Bank Dunia bahwa Sinergi memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan dalam hal tata kelola, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Ini penting untuk

memastikan bahwa hasil pembangunan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (World Bank, 2019).

Berdasarkan hasil review penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mendapatkan penilaian berdasarkan dimensi Sinergi, Kualitas Perencanaan, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja. Berikut hasil penilaian secara terperinci yang didapat berdasarkan 3 dimensi tersebut:

Sinergi

Sinergi adalah indikator untuk mengukur kerja sama antar unit pemerintahan, yaitu pemerintah dan daerah untuk saling mengisi dan melengkapi dalam upaya bersama membangun sebuah rencana agar pelaksanaan pelayanan dasar agar dapat mewujudkan tujuan bersama. Sinergi merupakan indikator untuk menilai tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang berdasarkan pada sasaran Prioritas Nasional. Sinergi yang kuat memungkinkan harmonisasi program pembangunan serta efisiensi penggunaan anggaran antara pusat dan daerah. Hal ini menghindari duplikasi kegiatan, mencegah pemborosan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas (Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020, 2020).

Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan pemeriksaan atas dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pandeglang didapat hasil tinjauan tim peneliti menemukan bahwa hasil dimensi Sinergi memiliki skor penilaian 26,81 dari nilai bobot maksimal sebesar 32. Hasil

komponen nilai sebesar 26,81 tersebut didapat dari beberapa indikator yang kriteria penilaian yaitu Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN dengan nilai sebesar 8,5, Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP dengan nilai sebesar 8,3125, dan Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD dengan nilai sebesar 10. Adapun secara terinci hasil penilaian dari masing-masing indikator dari aspek/dimensi Sinergi sebagai berikut:

a. Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN

Tingkat keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN dilihat berdasarkan sub bab kriteria keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN, tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kab. Pandeglang untuk mendukung kegiatan prioritas dalam RPJMN, indikator makro pada RPJMD Kab. Pandeglang selaras dengan indikator makro pada RPJMN, Dokumen RPJMD selaras dengan proyek prioritas strategis, Komponen SPM di RPJMD Kab. Pandeglang di selaraskan dengan komponen SPM Nasional, Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional. Secara terperinci masing-masing indikator penilaian pengukuran tingkat Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN adalah sebagai berikut:

- 1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang dengan sasaran

Prioritas Nasional (PN) RPJMN memiliki nilai 1,5 dari nilai bobot maksimal 2, dari hasil tersebut didapat bahwa terdapat tingkat keterkaitan indikator sasaran dan keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan Prioritas Nasional RPJMN. RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 telah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan dengan RPJMN tahun 2020-2024 yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Pandeglang memiliki keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN. Namun terdapat hal masih belum memenuhi untuk indikator keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN yaitu belum tersedianya/ dilengkapi tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dan PN RPJMN. Berdasarkan hasil analisis dan studi dokumentasi didapat bahwa kekurangan atas belum tersedianya/ dilengkapi tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dan PN RPJMN.

- 2) Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang untuk mendukung kegiatan prioritas dalam RPJMN

Indikator ini memiliki nilai yaitu 3 dari nilai bobot maksimal 3. Nilai 3 tersebut didapat dari kriteria penilaian yaitu ketersediaan dukungan program daerah dalam RPJMD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN RPJMN telah sesuai dengan kewenangan daerah, baik Prioritas Nasional Penguatan Ekonomi dan pertumbuhan Berkualitas, Pengembangan dan Pemerataan Wilayah, Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan, Penguatan Insfrastuktur dan Pelayanan Dasar, Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik semuanya telah sesuai dan disusun dengan kewenangan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang.

- 3) Indikator makro pada RPJMD Kabupaten Pandeglang selaras dengan indikator makro pada RPJMN

Indikator ini memiliki nilai yaitu 1 dari nilai bobot maksimal 1. Tingkat keselarasan indikator makro RPJMD dengan indikator makro RPJMN diukur dengan keselarasan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan penurunan tingkat kemiskinan antara RPJMN dengan RPJMD yang sama-sama konsisten menurunkan angka indikator makro tersebut. Selisih TPT dari tahun ke tahunnya semakin mengecil jika disandingkan dengan TPT secara nasional, dan begitu juga dengan tingkat kemiskinan.

- 4) Dokumen RPJMD selaras dengan proyek prioritas strategis

Indikator ini memiliki nilai yaitu 1 dari nilai bobot maksimal 1. Indikator ini telah terakomodir dan mendukung seluruh proyek prioritas strategis nasional dalam dokumen RPJMD.

- 5) Komponen SPM di RPJMD Kabupaten Pandeglang di selaraskan dengan komponen SPM Nasional

Telah terakomodir seluruh indikator SPM sesuai perundang-undangan pada dokumen RPJMD. Penerapan SPM di Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam dokumen RPJMD telah disusun dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2023 Tentang

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2027. Dalam Perbup tersebut penerapan SPM untuk pelaksanaan pelayanan dasar yang terdiri dari SPM bidang Pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang Pekerjaan Umum, SPM bidang perumahan rakyat, SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan SPM bidang sosial telah selaras dengan komponen SPM secara nasional. Penilaian standar ini memperoleh nilai yaitu 1 dari total nilai bobot maksimal 1.

- 6) Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional

Telah disesuaikan target indikator SPM sesuai target nasional. Penentuan target diselaraskan dengan target SPM nasional. Masing-masing nilai target SPM pelayanan dasar daerah mengikuti dengan target SPM pelayanan dasar nasional. Penilaian standar ini memperoleh nilai yaitu 1 dari total nilai bobot maksimal 1.

b. Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP

Tingkat keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RKP dilihat berdasarkan kriteria keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP, Tersedianya dukungan program daerah RKPD Kabupaten Pandeglang terhadap Kegiatan Prioritas pada seluruh PN, Indikator makro pada RKPD Kabupaten Pandeglang selaras dengan indikator makro pada RKP. Berikut terperinci masing-masing indikator penilaian pengukuran tingkat Keselarasan dokumen RKPD dengan dokumen RKP:

- 1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam

RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Pandeglang dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP memiliki nilai yaitu 2,5 dari nilai bobot maksimal 2,50 dari hasil tersebut didapat bahwa terdapat tingkat keterkaitan indikator sasaran dan keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan Prioritas Nasional RKP. RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 telah disusun sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan dengan RKP 2024 yang telah tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Pandeglang memiliki keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan PN RKP, sudah ada tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RKPD dan PN RKP dan sudah ada ada tabel persandingan antara PN RKP dengan prioritas pembangunan daerah.

- 2) Tersedianya dukungan program daerah RKPD Kabupaten Pandeglang terhadap Kegiatan Prioritas pada PN.

Indikator ini memiliki nilai yaitu 4,3125 dari nilai bobot maksimal 9. Nilai 4,3125 tersebut didapat dari kriteria penilaian bahwa ketersediaan dukungan program daerah dalam RKPD untuk mendukung kegiatan prioritas dalam PN RKP telah sesuai dengan kewenangan daerah, baik Prioritas Nasional Penguatan Ekonomi dan pertumbuhan Berkualitas, Pengembangan dan Pemerataan Wilayah, Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Penguatan Insfrastuktur dan Pelayanan Dasar, dan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, semuanya telah sesuai disusun dengan kewenangan

daerah yang tertuang dalam RKPD, namun belum didukung ketersediaan informasi eksplisit persandingan keterkaitan masing-masing program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah. Berikut kekurangan dalam sub indikator pada masing-masing yang belum didukung ketersediaan informasi eksplisit persandingan keterkaitan program prioritas/kegiatan prioritas RKP dengan program daerah:

- 3) Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP.

Indikator ini memiliki nilai yaitu 1,5 dari nilai bobot maksimal 1,50. Tingkat keselarasan indikator makro RKPD dengan indikator makro RKP diukur dengan keselarasan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan penurunan tingkat kemiskinan antara RKP dengan RKPD yang sama-sama konsisten menurunkan angka indikator makro tersebut. Selisih TPT dari tahun ke tahunnya semakin mengecil jika disandingkan dengan TPT secara nasional begitu juga dengan tingkat kemiskinan.

c. Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD

Indikator ini diukur berdasarkan tersedianya dukungan APBD untuk program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD, semuanya tertuang jelas dalam dokumen APBD untuk program prioritas nasional RKPD. Seperti dukungan untuk Prioritas Nasional 1 sampai dengan 6 yang ada dan tercantum dalam RKPD.

Kualitas Perencanaan

Aspek Kualitas Perencanaan adalah indikator untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan

kesesuaian antara isu strategis target-Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD, dan tingkat inovasi dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah. Nilai dari dimensi Kualitas Perencanaan adalah telah memperoleh nilai maksimal sebesar yaitu 58 dari bobot nilai maksimal 58. Komponen penilaian dari kualitas perencanaan terdiri atas:

a. Kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/proyek di RPJMD atau RKPD

Indikator ini memperoleh hasil penilaian sebesar yaitu 49 dari nilai bobot maksimal 49, yang dipengaruhi dari berbagai kriteria penilaian yaitu kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah, kesesuaian target dan sasaran pembangunan dalam menyelesaikan isu dan prioritas daerah, dan kesesuaian program/kegiatan/proyek dalam mencapai target dan sasaran program. Secara terperinci masing-masing kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah

Penilaian terhadap kriteria ini diperoleh nilai maksimal sebesar yaitu 18 dari bobot nilai maksimal 18. Artinya terdapat keterkaitan permasalahan daerah dengan hasil evaluasi, Keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan dan Penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan Isu Strategis. Permasalahan urusan ditelaah berdasarkan data target indikator kinerja masing-masing urusan pemda yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026 dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan setiap tahun. Serta disusun dengan kriteria adanya keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan

permasalahan pembangunan. Pada RPJMD telah disusun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pandeglang sehingga diketahui keterkaitan tersebut. Selanjutnya telah disusun prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

2) Kesesuaian target dan sasaran pembangunan dalam menyelesaikan isu dan prioritas daerah

Dari hasil penilaian terhadap kriteria ini bahwa didapat nilai sebesar yaitu 14 dari bobot nilai maksimal 14, yang didukung dari kriteria tersedianya indikator sasaran untuk isu strategis / prioritas pembangunan daerah dan tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah. Pada hasil analisis RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026, tersedianya indikator sasaran yang disinkronisasikan dengan isu startegis nasional seperti isu tujuan pembangunan kabupaten pandeglang serta tingkat kesesuaian indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dalam menyelesaikan isu strategis daerah/prioritas pembangunan daerah dengan nilai yang optimal.

3) Kesesuaian program/kegiatan/ proyek dalam mencapai target dan sasaran program

Dari hasil penilaian terhadap kriteria ini bahwa didapat nilai sebesar yaitu 17 dari bobot nilai maksimal 17, yang didukung dari kriteria Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas dan Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas. Pada hasil analisis RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026,

tersedianya Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas dan pada hasil analisis RKPD Kabupaten Pandeglang 2024, tersedianya Tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas.

b. Inovasi Perencanaan Pembangunan

Indikator ini memperoleh hasil penilaian sebesar yaitu 9 dari nilai bobot maksimal 9, Dari dokumen yang diterima peneliti. Peneliti menganalisis khususnya beberapa perangkat daerah yang memiliki fungsi secara langsung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Penilaian tersebut mengacu pada kriteria penilaian yaitu keterkaitan permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan, keterkaitan output dengan outcome inovasi, proporsi jumlah proyek inovasi di dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler.

Terkait Adanya aspek relevansi permasalahan dengan inovasi yang dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dengan adanya berbagai inovasi layanan yang diberikan perangkat daerah. Dengan acuan tersebut, maka peneliti memberikan penilaian untuk kriteria ini sebesar 3 dari bobot nilai maksimal 3. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya relevansi permasalahan daerah dengan inovasi yang telah dilaksanakan sebagaimana

Beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Pandeglang. Inovasi tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Pada aspek keterkaitan output dengan outcome inovasi, diukur berdasarkan banyak terobosan layanan yang diberikan perangkat daerah untuk masyarakat sehingga proses pelayanan lebih mudah. Atas dasar tersebut, penilaian terhadap

kriteria ini sebesar 3 dari bobot nilai maksimal 3. Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang telah memberikan inovasi layanan KPK (Kepuasan Pasien Elektronik) sehingga dapat memberikan kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan system pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan Pemda Kabupaten Pandeglang adalah pada tahap penerapan yang terdiri dari 28 inovasi pelayanan publik. Adapun indikator proporsi jumlah proyek inovasi didalam perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan proyek reguler yang telah lahir dari program inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh OPD kabupaten pandeglang yang berjumlah 28 inovasi serta pelayanan langsung pada masyarakat di beberapa perangkat daerah, rata-rata sudah pada tahapan inovasi penerapan dan lebih dari 5 %. Maka untuk indikator ini memperoleh skor maksimal sebesar 3. Hasilnya inovasi pada beberapa perangkat daerah tersebut sudah diatas 5 persen sehingga peneliti memberikan skor maksimal.

Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja

Pada aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan. Komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub-komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait. Hal peneliti mengacu pada berbagai dokumen perangkat daerah di Kabupaten Pandeglang. Dari dokumen tersebut peneliti melihat target dan sasaran

pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait. Selain itu, terdapat bahwa adanya *cascading* target pembangunan daerah menjadi target kinerja Lembaga terkait di dalam pemerintah daerah dengan adanya penanggungjawab OPD untuk masing-masing program prioritas dan Target dan sasaran prioritas daerah menjadi IKU OPD yang bertanggung jawab. sehingga hasil penilaian peneliti memberikan sebesar 10 dari bobot nilai maksimal 10. Indikator

yang pertama Tersedianya penanggungjawab OPD untuk masing masing program prioritas, sehingga hasil penilaian peneliti memberikan sebesar 5 dari bobot nilai maksimal 5, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 pada tiap perangkat daerah dalam menjalankan program prioritas nasional. Adapun rangkumannya dapat dilihat pada tabel berikut

Rangkuman Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang

Nama Indeks	Aspek	Indikator	Bobot	Skor Penilaian
1. Sinergi			32	26,81
	a.	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	9	8,5
		1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN	2	1,5
		2) Tersedianya dukungan program daerah dalam RPJMD Kab. Pandeglang untuk mendukung kegiatan prioritas dalam RPJMN	3	3
		3) Indikator makro pada RPJMD Kab Pandeglang selaras dengan indikator makro pada RPJMN	1	1
		4) Dokumen RPJMD selaras dengan proyek prioritas strategis.	1	1
		5) Komponen SPM di RPJMD Kab. Pandeglang di selaraskan dengan komponen SPM Nasional.	1	1
		6) Target SPM daerah diselaraskan dengan target SPM Nasional.	1	1
	b.	Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	13	8,3125
		1) Keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran prioritas nasional (PN) RKP.	2,50	2,5
		2) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 1: Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP	1,50	0,75
		3) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan pemerataan Wilayah RKP	1,50	0,75
		4) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP	1,50	0,75
		5) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP.	1,50	0,5625
		6) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	1,50	0,75
		7) Tersedianya dukungan program daerah RKPD terhadap kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP	1,50	0,75
		8) Indikator makro pada RKPD selaras dengan indikator makro pada RKP	1,50	1,5
	c.	Kesesuaian anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD	10	10
		1) Tersedianya dukungan APBD untuk program prioritas nasional/major project dalam dokumen RKPD	10	10
2. Kualitas Perencanaan			58	58
	a.	Kesesuaian antara isu strategis-target-program/kegiatan/proyek di RPJMD atau RKPD	49	49
		1) Kesesuaian isu strategis dengan kebutuhan daerah	18	18
		2) Kesesuaian target dan sasaran pembangunan dalam menyelesaikan isu dan prioritas daerah	14	14
		3) Kesesuaian program/kegiatan/proyek dalam mencapai target dan sasaran program	17	17

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang pada tahun 2024 sebesar 94,81 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan kinerja perencanaan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat baik.

Kesimpulan

Secara umum Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dengan nilai 94.81 dengan kategori sangat baik. Hal tersebut menunjukkan kinerja perencanaan di Pemerintah Kabupaten Pandeglang sangat baik. Dimensi Sinergi pada IPPN Pemda Kabupaten Pandeglang kurang mendapatkan penilaian maksimal diantaranya pada aspek keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN tidak maksimal karena pada Indikator keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dengan sasaran Prioritas Pembangunan Nasional (PN), tidak tersedianya tabel persandingan antara sasaran pembangunan daerah RPJMD dan PN RPJMN, serta aspek keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP ada beberapa kekurangan di bagian sub-indikator yang harus dilengkapi untuk memperbaiki skor IPPN Pemda Kabupaten Pandeglang.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haris, S. (2015). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Reformasi, Hambatan, dan Tantangan*. LIPI Press.

- Irwan, I., Latif, A., Mustanir, A., & Sellang, K. (2021). *Implementasi Perencanaan Pembangunan*. Media Sains Indonesia.
- Neuendorf, K. A. (2002). *The Content Analysis Guidebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nitisastro, W. (2014). Perencanaan Pembangunan. *Kompas*, 92.
- Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020 (2020).
- Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83.
- Soares, A. (2015). *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus pada District Development Officer Distrik Manatuto, Timor Leste*. Program Magister, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Turner, R. S., & Sarah. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4(2), 33–51.
- Wahyudi, D. (2018). Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 22(1), 11–22.
- World Bank. (2019). *Indonesia Governance Update: Improving Local Government Performance*.